

AKTUALISASI KEGIATAN KKN-PPM DALAM MENGUBAH SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT PEDESAAN

Oleh : Abdul Muis

Abstract

National education goals is to develop the intellectual life of the nation and develop a complete Indonesian man, the man of faith, have fear of God Almighty and noble character, skills, physical and spiritual health, a stable and independent personality and responsibilities of community and nationhood. In view of these objectives, the KKN PPM a form of activity that can educate people towards them. Therefore hampikan every college in Indonesia conducting KKN PPM had several years although there are colleges that negates, it is because it is not required by the government in this case the Director General of Higher Education to include in the curriculum KKN PPM. But now KKN PPM program was viewed by the Higher Education is very important role. So come down SK Higher Education No. 54 of 2011 regarding the implementation of KKN PPM in college. Because of the perceived benefits preformance change attitudes and behavior of rural communities in particular, through various activities and programs undertaken.

Keywords : *Field Work Experience and Community Service In (KKN PPM), changes in attitudes and behavior of society, local governments and universities as agents of renewal and change.*

A. Pengertian Kegiatan KKN-PPM

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk dari program Pengabdian Pada Masyarakat (P2M), yang dilaksanakan

oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan Dharma ketiga dari Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya KKN melibatkan tidak hanya Mahasiswa dan pemerintah kecamatan atau pemerintah desa

melainkan perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting.

Kerjasama antar perguruan tinggi dengan pemerintah daerah ini mutlak perlu karena keduanya mempunyai peran yang sama sebagai agen-agen pembaharuan (*change of agent*), yang harus membuat dirinya diterima oleh kelompok sasaran, yakni masyarakat yang hendak dibangun.

Menurut *Peter Myer Dhom*, perguruan tinggi pada umumnya mengemban tugas : “ Membentuk kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan menolong manusia untuk membentuk suatu dunia yang lebih baik baginya”. Jika tugas ini dapat disepakati, maka betapa menentukan dan strategisnya peranan perguruan tinggi itu dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsanya. Demikian menentukan dan sangat strategisnya peranan perguruan tinggi tersebut sehingga *Edward Shill* mengemukakan bahwa, “Berhasilnya program-program modernisasi dari Negara baru, sebagian besar bergantung pada jalannya system Universitas (perguruan tinggi). Karena Universitas merupakan sarana untuk menciptakan modernisasi dalam bidang politik, ekonomi sosial dan budaya”.

Kalau dikaji dari perjalanan Bangsa pada umumnya dan di Indonesia khususnya, tampaknya pendapat-pendapat tersebut di atas tidaklah berlebihan. Karena banyak bukti menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada bangsa umumnya berawal dari sekelompok

elit/kecil masyarakat tempaan dari perguruan tinggi. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga keilmuan yang memberikan refleksi dan transformasi kebudayaan bagi masyarakatnya.

Diberbagai perguruan tinggi khususnya di Indonesia, peran tersebut lebih luas karena selain pemikir dan perencana, diharapkan pula untuk mendidik mahasiswanya agar berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara. Hal ini tercermin dalam Undang-undang Perguruan Tinggi.

a. Kuliah Kerja Nyata sebagai sarana bagi mahasiswa.

Sebagai penjabaran dari usaha merealisasikan tugas dan peranannya bagi para mahasiswa maka lahirlah gagasan yang disebut Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang merupakan bentuk pengintegrasian antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi bersama pemerintah daerah yang dilaksanakan secara interdisipliner. Karena sejak awal pencetusannya dilandasi oleh keinginan untuk lebih meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dalam pembangunan, maka kuliah kerja nyata merupakan sarana yang sangat tepat bagi mahasiswa untuk mendharmabaktikan diri untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata

mahasiswa dapat membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan di pedesaan/kelurahan, dengan harapan :

1. Masyarakat memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan serta melaksanakan proyek pembangunan;
2. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat akan lebih meningkat sesuai dengan program pembangunan;
3. Masyarakat memperoleh berbagai pembaharuan yang diharapkan;
4. Terbentuknya kader-kader pembangunan dalam masyarakat sehingga terjamin terbentuknya penerus-penerus pembangunan.

b. Peran Mahasiswa Dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa kuliah kerja nyata adalah bentuk pengintegrasian kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat terutama bagi mahasiswa. Dengan demikian, maka mahasiswa merupakan wakil perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam usaha pembangunan di sini ialah usaha perubahan yang direncanakan dan bertujuan untuk menimbulkan suasana perubahan yang bermanfaat bagi orang-orang yang terkait di dalamnya dan bagi pemerintah.

Oleh karenanya peranan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat menimbulkan perubahan pada masyarakat di lokasi KKN dalam bentuk kegiatan, program atau proyek yang disusun secara terarah dan terencana. Dalam melaksanakan peranan tersebut mahasiswa berfungsi sebagai penyuluh (motivator) dan pemrakarsa (initiator) yang bertugas membawa gagasan baru (innovator) kepada masyarakat dan atau sebagai pendorong (stimulator) perubahan dalam masyarakat ke arah tingkat hidup yang lebih baik.

c. Transfer dan Transformasi Nilai sebagai alternative dalam mengubah sikap dan perilaku Masyarakat.

Secara umum transfer berarti memindahkan/pemindahan, sedang kan transformasi nilai diartikan sebagai terjadinya perubahan yang disengaja dan terencana terhadap nilai-nilai yang dianut seseorang/ masyarakat kepada nilai-nilai baru yang ditetapkan. Nilai-nilai baru tersebut dapat berupa nilai-nilai lama yang diperbaharui, atau nilai-nilai yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak dikenal. Dalam uraian berikut penulis menggunakan istilah transformasi sebagai berikut :

1. Unsur-Unsur Transformasi.

Sebagaimana lazimnya dalam suatu perubahan, maka dalam transformasi nilai pun akan terlibat unsur-unsur sebagai berikut :

a. Transformator

Dalam suatu perubahan peran transformator sangat menentukan, karena melalui transformatorlah suatu misi/ pesan/ penerangan/ informasi diolah dan dikembangkan untuk kemudian disampaikan kepada khalayak/masyarakat. Bagaimana baiknya suatu misi/pesan, kalau transformasinya tidak memiliki kompetensi yang memadai maka sering terjadi misi/pesan tersebut tidak dapat ditangkap atau dipahami oleh masyarakat sebaliknya, walaupun suatu misi tidak sempurna namun bila disampaikan oleh transformator yang cakap dan memahaminya dengan baik

maka pesan tersebut dapat tertangkap atau dipahami dengan baik. Oleh karena itu kedudukan transformator sangat menentukan dalam suatu perubahan, yang kesemuanya perlu dituangkan oleh beberapa persyaratan, yaitu :

- Tahu dan paham akan misi yang diembannya;
- Punya dedikasi (semangat) yang tinggi;
- Mampu melakukan pendekatan secara persuasive.

Dalam hal pelaksanaan KKN-PPM, maka yang bertindak sebagai transformator adalah mahasiswa

dan aparat. Untuk ini mahasiswa harus mampu untuk menjadi jembatan penghubung antara dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dengan masyarakat pedesaan. disamping harus mampu mengubah masyarakat yang statis tradisional menjadi suatu masyarakat yang dinamis, rasional dan kreatif. Sehingga mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai transformator, mahasiswa juga harus mampu untuk menterjemahkan dan menginterpretasikan isi ilmu pengetahuan dan teknologi itu ke dalam bahasa dan simbol-simbol yang dapat dengan mudah untuk dicerna oleh masyarakat sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Dengan kata lain mahasiswa peserta KKN harus berusaha untuk memanfaatkan semua potensi dan kondisi yang menguntungkan sehingga :

- Mampu menyadarkan masyarakat tentang adanya suatu inovasi yang berguna bagi mereka, sehingga mereka tertarik dan berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut;
- Mampu mengusahakan dan mengarahkan mereka berpikir secara objektif sehingga dapat memberikan nilai terhadap inovasi tersebut secara jujur dan rasional;
- Mampu mendorong dan menyadarkan masyarakat agar dengan keyakinan sendiri

mereka mengerti bahwa inovasi itu berguna bagi mereka sehingga mau untuk mempraktikannya dengan penuh kesadaran.

- Mampu menunjukkan kepada masyarakat luas untuk mengembangkan inovasi tersebut.

Pastinya, mahasiswa dapat membantu masyarakat dalam segala aspek kehidupan, membangun idealisme dan harapan atau cita-cita yang mendorong mereka ke arah pembangunan dan kehidupan yang lebih baik.

b. Masage/Misi/Pesan

Tidak kalah pentingnya dalam suatu transformasi selain transformator adalah message/misi/pesan. Karena misi inilah maka *transformator* berusaha, berupaya dan bekerja. Oleh karenanya agar transformator dalam menjalankan tugasnya tetap terarah dan tidak sporadis, kata pemahaman yang akan disampaikan mutlak diperlukan. Dalam kegiatan KKN-PPM, maka misi yang diemban oleh mahasiswa adalah misi dari perguruan tinggi sebagaimana yang tercantum dalam pola pembinaan perguruan tinggi, dan misi dari pemerintahan daerah seperti yang tertuang dalam program-program pembangunan pemerintahan daerah.

c. Metode

Penting untuk diperhatikan oleh *transformator* dalam menyampaikan misinya kepada masyarakat, adalah metode. Yang dimaksud dengan Metode di sini adalah cara dalam hal bagaimana transformtor menyampaikan misi itu kepada masyarakat. Tidak sedikit misi yang gagal disampaikan kepada masyarakat bukan disebabkan oleh transformatornya yang kurang kompeten, tetapi hanya karena metode yang digunakan tidak tepat. Oleh karena itu pemilihan metode dalam suatu transformasi menjadi suatu yang sangat penting. Secara umum metode yang biasanya dipergunakan dalam suatu transformasi adalah :

- Ceramah;
- Dialog;
- Diskusi;
- Tindakan.

d. Media

Untuk menunjang penyampaian misi kepada masyarakat *Transformator* dapat mempergunakan media/alat/sarana. Secara garis besar, media dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu :

- Media tradisional (misal : kesenian tradisional);
- Media modern (misal : multi media, televisi, radio, film, surat kabar).

Dalam menentukan media mana yang akan dipakai maka keadaan sosial psikologis masyarakat perlu

mendapatkan perhatian dari transformator.

e. Audience/sasaran.

Dalam suatu transformasi, maka yang biasanya menjadi sasaran adalah masyarakat. Karena masyarakatlah yang pada akhirnya diharapkan dapat berubah pandangan, sikap dan perilaku mereka sehingga sesuai dengan misi yang disampaikan oleh transformator bahwa audience/sasaran dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:

- Sasaran pokok (dalam hal ini adalah masyarakat);
- Sasaran antara (dalam hal ini adalah tokoh-tokoh terkemuka masyarakat terhadap penyampaiannya kepada masyarakat umum)

Dalam pelaksanaan KKN-PPM, yang menjadi sasaran pokok adalah masyarakat yang secara keseluruhan, sedangkan yang menjadi sasaran antara adalah para tokoh masyarakat yang terdiri dari :

- Pemuka agama;
- Pengurus dan anggota PKK
- Pengurus dan anggota UPPKS
- Petugas PLKB dan PPL
- Pengurus dan anggota Karang Taruna;
- Pengurus dan anggota organisasi lain.

A. Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Wilayah Lokasi KKN.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui KKN-PPM adalah melalui pendidikan non formal. Yaitu pendidikan di luar system persekolahan dan ini dijalankan dalam bentuk : kelompok belajar, karang taruna, magang dan belajar mandiri.

Program pendidikan dasar atau program Paket ditujukan untuk melayani masyarakat yang buta huruf dan putus sekolah dasar. Hal tersebut dengan tujuan untuk memberantas sekaligus tiga buta, yaitu buta aksara, latin, dan angka, buta Bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar.

Sedangkan program pendidikan mata pencaharian atau kewirausahaan ditujukan untuk melayani masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau belum mempunyai penghasilan tetap. Ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kedua program yang dilaksanakan tersebut didukung oleh program-program sektoral, misalnya :

1. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau Program PKK, untuk melayani keluarga khususnya kaum wanita yang sudah mampu membaca dan menulis dengan tujuan untuk meningkatkan peran wanita dalam mengembangkan potensi insaniah keluarga, menuju keluarga sehat dan sejahtera.

2. Program pendidikan kejuruan masyarakat, termasuk program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Untuk mengetahui latar belakang istilah program kejar yang kemudian dijadikan strategi pelaksanaan bakti KKN-PPM seperti:

- Kebutuhan nilai spiritual ;
- Pengembangan sikap positif;
- Kemampuan baca tulis al- Quran;
- Pemahaman tentang alam sekitar;
- Pembinaan keluarga sehat dan sejahtera;
- Memfungsikan pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat hidup lebih baik;
- Hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pelaksanaa KKN-PPM melalui pelaksanaan kejar dan program pendidikan kewirausahaan dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan.

B. Kemungkinan Penyempurnaan dan Pengembangan KKN-PPM sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003.

Dalam undang-undang tersebut tidak ada satu pasalpun yang menyebut tentang pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu tugas dari Perguruan tinggi, yang ada hanya dalam SK Dikti Nomor 54 Tahun 2011. Inipun hanya secara normative bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Dapat dilaksanakan pada Perguruan Tinggi

yang kegiatannya serta dananya diatur oleh perguruan tinggi tersebut.

Dalam hal ini masih ada hak otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengelola lembaga sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan dan penelitian ilmiah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 ayat 1 – 3, yang Berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- 2) Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Kemudian Melihat kepada Surat Keputusan Dikti Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pelaksanaa Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian Pada Masyarakat (KKN-PPM) bahwa setiap perguruan tinggi dianjurkan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini karena dirasakan amat penting manfaatnya. Walaupun dalam Surat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa aturan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan baik mengenai teknis, materi, maupun pendanaan.

Dengan SK Dikti tersebut, maka jelas bahwa KKN-PPM ternyata sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian beberapa perguruan tinggi banyak yang masih melaksanakan kegiatan KKN – PPM, seperti Universitas Gajah Mada Yogyakarta, kemudian Universitas Padjadjaran Bandung yang pelaksanaannya ditungkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor masing-masing.

Di samping karena manfaat yang diperoleh baik bagi perguruan tinggi maupun bagi pemerintah daerah, prinsip-prinsip lain yang perlu dipedomani adalah :

- a. Pembentukan watak agar mahasiswa mempunyai kemandirian dan mampu menjadi problem solver yang terjadi di masyarakat;
- b. Memperhatikan kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Mengembangkan sikap kebersamaan baik antar mahasiswa, maupun antar perguruan tinggi dengan pemerintah daerah sebagai dua komponen pembaharu yang potensial.

Sehubungan dengan surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 54 tahun 2011 tersebut, maka pemerintah daerah dan perguruan tinggi ke depan harus benar-benar lebih matang dan lebih siap dalam pelaksanaan KKN – PPM. Agar hasilnya benar-benar optimal dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Dengan demikian Pemerintah Daerah bukan hanya sebagai objek pelaksanaan KKN-PPM tetapi juga

sebagai pendukung modal yang secara konkrit di ajukan dalam APBD, sehingga dalam pelaksanaannya tidak setengah-setengah.

Dengan perencanaan yang matang serta anggaran yang jelas dialokasikan, maka kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien. Mengapa dikatakan efisien. Karena kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa jauh lebih matang dan berkualitas dibandingkan dengan oleh pemborong. Kenapa dikatakan lebih efektif karena mahasiswa dengan dosen pembimbingnya tentunya lebih memiliki kemampuan dalam penyusunan perencanaan serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Karena kegiatan yang dilakukan semata-mata ingin dapat dirasakan oleh masyarakat selamanya. Sehingga kualitas kegiatanpun tentunya sangat lebih diperhatikan.

Adapun perencanaan KKN-PPM yang lebih matang perlu disusun melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. Pendekatan Sosial

Tujuan pendekatan sosial adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan, sasaran, program dan pelaksanaan KKN-PPM. Apabila semua pihak memahami segi-segi positif dan manfaat KKN-PPM, maka diharapkan tercipta dan tumbuh kerjasama serta partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan suatu program. Kelompok sasaran yang perlu didekati dalam hal ini tidak hanya warga masyarakat yang akan menjadi lokasi KKN-PPM, tetapi juga aparat pemerintah dan

swasta yang mungkin terkait dengan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM Materi yang perlu disebarluaskan kepada pihak-pihak tersebut antara lain mengenai latar belakang, pengertian, dasar dan tujuan program KKN-PPM maupun tugas-tugas kegiatan mahasiswa.

b. Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi dapat dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan atau bidang keilmuan yang dimiliki mahasiswa. Sebagai criteria pemilihan lokasi antara lain dengan memperhatikan kebutuhan objektif suatu wilayah, pelaksanaan KKN-PPM di lokasi yang bersangkutan akan benar-benar dirasakan manfaatnya baik oleh masyarakat maupun oleh perguruan tinggi/mahasiswanya.

c. Observasi Wilayah

Agar pelaksanaan program KKN-PPM dapat berhasil baik, maka perlu dimiliki keterangan yang lengkap dan terperinci sebelum mahasiswa mulai terjun ke lapangan. Untuk itu perlu dilakukan pengamatan terutama oleh panitia atau staf KKN-PPM sebagai observasi pendahuluan. Yang kemudian disusun satu program kerja umum yang kemudian dirinci menjadi sub-sub program seperti; prasarana fisik, peningkatan produksi, sosial budaya, kesehatan masyarakat, administrasi pemerintahan desa dan sebagainya.

d. Latihan/Pembekalan

Pembekalan diberikan kepada mahasiswa peserta KKN-PPM, sebelum di terjunkan ke lapangan terlebih dahulu diberikan pengetahuan dan ketrampilan (teori dan praktik) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kalau melihat secara keseluruhan kondisi wilayah desa yang ada di Jawa Barat khususnya kegiatan KKN-PPM bagi mahasiswa program-program yang dapat dilaksanakan adalah :

a. Bidang program fisik

1. Penanganan sampah;
2. Pengadaan air bersih;
3. Perbaikan saluran got dan saluran air bersih;
4. Pembangunan perpustakaan desa/RW;
5. Penghijauan;
6. Jalan lingkungan (seperti MHT);
7. Pembuatan nama-nama jalan.

b. Bidang Sosial Budaya

1. Kursus ketrampilan;
2. Penyuluhan;
3. Menghidupkan organisasi pemuda;
4. Pengembangan proyek pariwisata;
5. Mengembangkan budaya setempat.

c. Bidang Pemerintahan

1. Memperbaiki administrasi desa, RT, RW.;
2. Memperbaharui data monografi;
3. Memperbaharui data pertanahan;

4. Menggalakn pembayaran PBB;
5. Penyuluhan mengenai UU politik, UU Pilpres, PP Pilkada, UU keormasan;
6. Penyuluhan mengenai hidup sehat serta kebersihan lingkungan;
7. Penerangan KB;
8. Pemanfaatan lahan pekarangan.

Dari daftar kegiatan tersebut di atas tentunya masih banyak kegiatan lain yang dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan kemampuan mahasiswa sebagai peserta KKN-PPM serta dana yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Tinggi;

Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Nomor 54 Tahun 2011. Tentang Pelaksanaan KKN-PPM